

## Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

Muhammad Abdul Malik Ridho\*, Diana Wijayanti

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author: 18313067@alumni.uui.ac.id

---

### JEL Classification Code:

M30, M32, N41

### Kata kunci:

Ketimpangan, koefisien gini, data panel, Indonesia, dana perimbangan.

### Email penulis:

diana.wijayanti@uui.ac.id

### DOI:

10.20885/JKEK.vol1.iss1.art7

### Abstract

**Purpose** – This research aims to analyze the impact of general allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK), revenue sharing tax fund (DBH Pajak), and economic growth on income inequality in Indonesia

**Methods** – The research used secondary data in 34 province in Indonesia between 2015-2020 referenced from Central Bureau of Statistics. The used analytical tool was panel data.

**Findings** – The research outcome showed that DAU has a negative effect on income inequality, DAK and DBH Pajak has no significant effect on income inequality, and economic growth has positive and significant impact on income inequality.

**Implication** – The central government needs to improve the DAU budget allocated to the regions, expand the control and deregulation regarding the DAK realized expenditure, enlarge the composition of revenue sharing tax fund to the unconcerned regions and generate inclusive economic growth.

**Originality** – This research contribute in analyzing the impact of fiscal balance transfer on income inequality in Indonesia using panel data analysis.

---

### Abstrak

**Tujuan** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

**Metode** – Penelitian ini menggunakan data sekunder 34 Provinsi di Indonesia tahun 2015-2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang digunakan adalah data panel.

**Temuan** – Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, DAK dan DBH Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

**Implikasi** – Pemerintah pusat perlu untuk meningkatkan besaran DAU yang dialokasikan kepada pemerintah daerah, meningkatkan pengawasan dan deregulasi terkait realisasi belanja DAK, meningkatkan porsi pembagian DBH pajak kepada daerah tidak bersangkutan dan menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi inklusif.

**Orisinalitas** – Penelitian ini berkontribusi dalam menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan menggunakan analisis data panel.

---

## Pendahuluan

Secara umum, setiap negara di dunia memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan semua orang melalui pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi adalah upaya suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan menggunakan sumber daya yang ada. Peningkatan kemakmuran dapat diukur antara lain dengan peningkatan pendapatan nasional setiap tahun atau tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Sukirno, 1985). Selain itu, menurut Todaro & Smith (2006), pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan pendapatan. Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan seringkali dinilai dari tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Derajat kemiskinan dan ketimpangan merupakan indikator tingkat kepentingan masyarakat. Pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah lebih terfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Tapi itu bukan ketidaksetaraan. Koefisien Gini merupakan salah satu model untuk mengukur derajat disparitas pendapatan antar penduduk. Semakin tinggi koefisien Gini di suatu wilayah, semakin besar ketimpangan di wilayah tersebut, yang menunjukkan bahwa pendapatan tidak merata antara yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah.

**Tabel 1.** Gini Ratio 34 Provinsi Indonesia Semester 1 (Maret) 2020 – 2018

| Provinsi             | Tahun |      |       | Provinsi            | Tahun |      |       |
|----------------------|-------|------|-------|---------------------|-------|------|-------|
|                      | 2020  | 2019 | 2018  |                     | 2020  | 2019 | 2018  |
| Aceh                 | 0.323 | 0.32 | 0.325 | Nusa Tenggara Barat | 0.376 | 0.38 | 0.372 |
| Sumatera Utara       | 0.316 | 0.32 | 0.318 | Nusa Tenggara Timur | 0.354 | 0.36 | 0.351 |
| Sumatera Barat       | 0.305 | 0.31 | 0.321 | Kalimantan Barat    | 0.317 | 0.33 | 0.339 |
| Riau                 | 0.329 | 0.33 | 0.327 | Kalimantan Tengah   | 0.329 | 0.34 | 0.342 |
| Jambi                | 0.32  | 0.32 | 0.334 | Kalimantan Selatan  | 0.332 | 0.33 | 0.344 |
| Sumatera Selatan     | 0.339 | 0.33 | 0.358 | Kalimantan Timur    | 0.328 | 0.33 | 0.342 |
| Bengkulu             | 0.334 | 0.34 | 0.362 | Kalimantan Utara    | 0.292 | 0.3  | 0.303 |
| Lampung              | 0.327 | 0.33 | 0.346 | Sulawesi Utara      | 0.37  | 0.37 | 0.394 |
| Kep. Bangka Belitung | 0.262 | 0.27 | 0.281 | Sulawesi Tengah     | 0.326 | 0.33 | 0.346 |
| Kep. Riau            | 0.339 | 0.34 | 0.33  | Sulawesi Selatan    | 0.389 | 0.39 | 0.397 |
| Dki Jakarta          | 0.399 | 0.39 | 0.394 | Sulawesi Tenggara   | 0.389 | 0.4  | 0.409 |
| Jawa Barat           | 0.403 | 0.4  | 0.407 | Gorontalo           | 0.408 | 0.41 | 0.403 |
| Jawa Tengah          | 0.362 | 0.36 | 0.378 | Sulawesi Barat      | 0.364 | 0.37 | 0.37  |
| Di Yogyakarta        | 0.434 | 0.42 | 0.441 | Maluku              | 0.318 | 0.32 | 0.343 |
| Jawa Timur           | 0.366 | 0.37 | 0.379 | Maluku Utara        | 0.308 | 0.31 | 0.328 |
| Banten               | 0.363 | 0.37 | 0.385 | Papua Barat         | 0.382 | 0.39 | 0.394 |
| Bali                 | 0.369 | 0.37 | 0.377 | Papua               | 0.392 | 0.39 | 0.384 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia dengan proporsi sebanyak 56,10% dari penduduk Indonesia. Dari data tabel 1. di atas diketahui bahwa tingkat ketimpangan di pulau Jawa masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan daerah - daerah lain. Provinsi DIY tercatat dalam beberapa tahun terakhir sebagai provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 0,434 (2020), sebesar 0,42 (2019), dan sebesar 0,441 (2018).

Beberapa penelitian hingga saat ini, termasuk penelitian Chamber (2010), Wahiba & El Weriemmi (2014), dan Rubin & Segal (2015), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka ketimpangan pendapatan semakin besar. Ketidaksetaraan yang tidak terselesaikan memengaruhi berbagai masalah multidimensi. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Namun penelitian dari Bouincha dan Karim (2018) yang meneliti tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan pada 189 negara periode tahun 1990 hingga 2015 menemukan bahwa pertumbuhan memang mampu menurunkan ketimpangan pendapatan ketika suatu negara sudah mencapai level pembangunan tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Tak lama kemudian, pada 1 Januari 2001, era desentralisasi dimulai. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia bertujuan untuk menciptakan aspek kemandirian daerah dengan cara memberikan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah dengan tujuan untuk mengatasi ketimpangan yang bersifat horizontal maupun vertikal antara pusat dengan daerah (Haryanto, 2015). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjembatani kesenjangan anggaran dan menyeimbangkan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah untuk mendukung kemandirian kinerja pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana perimbangan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus pemerintah daerah. Ada tiga standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kebutuhan khusus. Ketiga standar tersebut adalah: 1) Kebutuhan yang tidak dapat ditentukan melalui formula dana alokasi umum; 2) Kebutuhan yang termasuk ke dalam prioritas nasional; 3) Kebutuhan dana untuk upaya pelestarian lingkungan alam dan yang dilaksanakan daerah penghasil. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak penghasilan pasal 25, 29, dan pasal 21, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan lainnya.

Penelitian dari Calderón dan Servén menyatakan bahwa tidak hanya kualitas infrastruktur namun juga kuantitas infrastruktur terbukti mampu mengurangi angka kemiskinan dan memperkecil tingkat ketimpangan pendapatan di 100 negara selama tahun 1960 hingga 2000 (Calderón & Servén, 2004). Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Shenggen Fan, Linxiu Zhang, dan Xiaobo Zhang (2002) di China tahun 2002, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pembangunan infrastruktur pertanian, jalan dan listrik, pendidikan serta pembangunan di perdesaan terbukti mampu mengurangi kemiskinan dengan meningkatnya produktivitas pertanian (Fan et al., 2002). Hal ini didukung pula dengan hasil penelitian dari Adam Yeeles (2015) yang menemukan bahwa transfer fiskal mampu menurangi disparitas pendapatan antar wilayah di Filipina.

Kebijakan desentralisasi fiskal dengan diberikannya dana perimbangan diharapkan dapat mengatasi ketimpangan di Indonesia. Desentralisasi adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan mengurangi kesenjangan regional (Akai & Sakata, 2005). Dana perimbangan didanai dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi.

Desentralisasi memungkinkan untuk merancang kebijakan ekonomi global dengan kebutuhan ekonomi regional, dengan demikian meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Schnellenbach, Baskaran, & Feld, 2014). Namun pertumbuhan ekonomi yang saat ini terjadi tidak selaras dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Dana perimbangan yang berimplikasi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi masih belum mampu mengatasi ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Deni Herdiyana (2019) yang menemukan bahwa hubungan DAU dan DAK terhadap kesenjangan horizontal adalah kuat sedangkan korelasi transfer DAU terhadap kesenjangan horizontal adalah lebih signifikan dibandingkan dengan korelasi transfer DAK terhadap kesenjangan horizontal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas maka dapat diambil hipotesis pada penelitian ini yaitu DAU, DAK, DBH Pajak dan pertumbuhan ekonomi mampu berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Atas berbagai permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis data panel untuk 34 provinsi di Indonesia selama periode 2015-2020. Data diperoleh dari publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Badan Pusat Statistik. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 2.** Definisi Operasional Variabel

| Variabel              | Simbol | Satuan      | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dana Alokasi Umum     | DAU    | Ribu Rupiah | Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.                                                                       |
| Dana Alokasi Khusus   | DAK    | Ribu Rupiah | DAK merupakan bagian dari dana perimbangan yang berasal dari APBN. Dana tersebut ditransfer dari pusat ke daerah untuk mendanai kegiatan khusus atau kegiatan tertentu milik daerah yang sejalan dengan prioritas nasional.                                        |
| Dana Bagi Hasil Pajak | DBHP   | Ribu Rupiah | Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah yang ditentukan dengan angka persentase tertentu dari pendanaan Negara.                                                                                                      |
| Pertumbuhan Ekonomi   | Growth | Persen      | Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah pertumbuhan PDRB tiap provinsi di Indonesia.                    |
| Gini Ratio            | GR     | Skala 0-1   | Koefisien gini atau Gini Ratio sebagai indikator untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Data *time series* merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Sedangkan data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari suatu sampel (Widarjono, 2018). Gabungan dari *time series* dan *cross section* disebut dengan data panel. Dalam data panel setiap variabel memiliki *i* dan *t* yang berarti *i* adalah banyak jumlah individu dan *t* adalah banyaknya waktu. Data panel memiliki 2 jenis yaitu *balanced panel* dan *unbalanced panel*. *Balanced panel* ketika unit waktu (*t*) sama untuk semua individu, sedangkan *unbalanced panel* ketika unit waktu (*t*) tidak sama untuk semua individu. Penulis menggunakan *balanced panel* dalam penelitian ini.

Terdapat 3 model untuk estimasi data panel yang nanti selanjutnya akan ditentukan model terbaik di antara ketiga model tersebut. Ketiga model tersebut adalah *Common Effect model*, *Fixed Effect model* dan *Random Effect model*.

Pada model *Common Effect* estimasi hanya dengan mengombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect* (Widarjono, 2018).

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen

X = Variabel Independen

*i* = *cross section*

*t* = *time series*

Model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa intersepnya berbeda. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan dummy variabel untuk melihat adanya perbedaan pada intersep. Perbedaan intersep antara *cross-section* namun intersepnya sama antar waktu. Selain itu, dalam model *fixed effect* juga diasumsikan jika koefisien regresi (*slope*) tetap antar provinsi antar waktu (Widarjono, 2018).

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + \beta_5 D_{1i} + \beta_6 D_{2i} \dots + e_{it}$$

Keterangan:

D = Dummy

Pada Model ini variabel gangguan mungkin saling berkorelasi antar waktu dan antar individu. Pada model Random Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms pada setiap *cross section*. Kelebihan dalam menggunakan model *Random Effect* yaitu dapat menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS) (Widarjono, 2018).

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + v_{it} v_{it} = e_{it} + u_i$$

Untuk metode pemilihan model terbaik diantara ketiga model diatas maka perlu dilakukan uji *Chow*, uji *Lagrange Multiplier*, dan uji *Hausmann*. Pada uji *Chow* maka model terbaik adalah *common effect* ketika gagal menolak  $H_0$  dan *fixed effect* ketika menolak  $H_0$ . Pada uji *Lagrange Multiplier* model terbaik adalah *common effect* ketika gagal menolak  $H_0$  dan *random effect* ketika menolak  $H_0$ . Pada uji *Hausmann* maka model terbaik adalah *fixed effect* ketika gagal menolak  $H_0$  dan *random effect* ketika gagal menolak  $H_0$ . Bentuk umum dari model regresi data panel dalam penelitian ini adalah:

$$GR_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 BHP_{it} + \beta_4 Growth_{it} + e_{it}$$

- GR = Rasio Gini
- DAU = Dana Alokasi Umum (Ribuan Rupiah)
- DAK = Dana Alokasi Khusus (Ribuan Rupiah)
- BHP = Dana Bagi Hasil Pajak (Ribuan Rupiah)
- Growth = Pertumbuhan Ekonomi (%)

### Hasil dan Pembahasan

Penelitian dianalisis dengan metode data panel. Untuk memilih model terbaik dilakukan beberapa model pengujian di antaranya adalah *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

**Tabel 3.** Hasil Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect

| Variabel | Common Effect |        | Fixed Effect |        | Random Effect |        |
|----------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|          | Coefficient   | Prob.  | Coefficient  | Prob.  | Coefficient   | Prob.  |
| C        | 0.341845      | 0.0000 | 0.368592     | 0.0000 | 0.366375      | 0.0000 |
| DAU      | 1.29E-12      | 0.8216 | -7.71E-12    | 0.0208 | -7.23E-12     | 0.0265 |
| DAK      | 2.75E-12      | 0.1897 | -1.52E-12    | 0.1964 | -1.25E-12     | 0.2787 |
| BHP      | 3.52E-12      | 0.0061 | -3.29E-14    | 0.9862 | 1.19E-12      | 0.4414 |
| Growth   | 0.001776      | 0.0120 | 0.000706     | 0.0046 | 0.000767      | 0.0020 |

Pengujian kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji *Chow*, uji *LM* dan uji *Hausman* untuk mengetahui model yang terbaik.

**Tabel 4.** Hasil uji *Chow*

| Effects Test             | Statistic  | d.f.     | Prob.  |
|--------------------------|------------|----------|--------|
| Cross-section F          | 54.736236  | (33,166) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 504.893008 | 33       | 0.0000 |

Diketahui nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar  $0.000 < \alpha 5\%$ . Dari hasil di atas maka terbukti menolak  $H_0$ . Artinya model terbaik adalah model *Fixed Effect*.

**Tabel 5.** Hasil uji *Lagrange Multiplier*

|               | Test Hypothesis      |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | Cross-section        | Time                 | Both                 |
| Breusch-Pagan | 362.8775<br>(0.0000) | 0.000820<br>(0.9772) | 362.8783<br>(0.0000) |

Diketahui nilai probabilitas *Breusch-Pagan Cross-section* sebesar  $0.000 < \alpha 5\%$ . Dari hasil di atas maka terbukti menolak  $H_0$ . Artinya model terbaik adalah model *Random Effect*.

**Tabel 5.** Hasil uji *Hausman*

| Test Summary         | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.  |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 8.824125          | 4            | 0.0656 |

Diketahui nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar  $0.0656 > \alpha 5\%$ . Dari hasil di atas maka terbukti gagal menolak  $H_0$ . Artinya model terbaik adalah model *Random Effect*. Menurut Gujarati & Porter (2009), persamaan yang memenuhi asumsi klasik hanya persamaan yang menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS). Dalam evIEWS model estimasi yang menggunakan metode GLS hanya *random effect model*, sedangkan *fixed effect* dan *common effect* menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Model terbaik dalam penelitian ini adalah model *Random Effect* maka dari itu uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan.

### Uji Kelayakan Model dan Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil *Random Effect* didapatkan F-statistic sebesar 10,335 dan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  maka menolak  $H_0$ . Artinya adalah model yang diestimasi layak digunakan dan terbukti bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2015 – 2020. Selain itu juga diketahui bahwa nilai R-Squared sebesar 0,172 atau 17,2%. Hal ini berarti bahwa variabel ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel DAU, DAK, DBH Pajak dan pertumbuhan ekonomi sebesar 17,2% sedangkan sisanya sebesar 82,8% dijelaskan variabel lain di luar model.

### Uji Parsial

Berdasarkan hasil estimasi EvIEWS diketahui bahwa nilai t statistik untuk variabel DAU sebesar -2,23 dan nilai prob sebesar  $0,02 < \alpha = 0,05$  maka menolak  $H_0$ . Artinya adalah variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien sebesar -7,23E-12 artinya ketika DAU meningkat sebesar Rp 1.000,- maka ketimpangan pendapatan akan turun sebesar 0,00000000000723. Hal ini berimplikasi bahwa Dana Alokasi Umum yang diberikan pusat ke daerah mampu berkontribusi dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan daerah meskipun kontribusinya tidak cukup besar. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Meskipun DAU yang diberikan pusat kepada daerah telah terbukti mampu mengurangi ketimpangan namun besaran kontribusinya sangat sedikit. Hal ini dikarenakan DAU sebagian besar masih digunakan untuk belanja pegawai, sementara DAK baru digunakan untuk belanja modal.

Berdasarkan hasil estimasi EvIEWS diketahui bahwa nilai t-statistik untuk variabel DAK sebesar -1,086 dan nilai prob sebesar  $0,2787 > \alpha = 0,05$  maka gagal menolak  $H_0$ . Artinya adalah variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. DAK yang selama ini diberikan masih belum mampu mengatasi ketimpangan pendapatan di daerah. Hal ini disebabkan karena arah kegiatan DAK yang masih ditujukan untuk bidang – bidang yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Selama ini alokasi DAK hanya diberikan pada bidang – bidang dasar seperti bidang infrastruktur sanitasi, infrastruktur jalan, bidang kehutanan, bidang keselamatan transportasi darat dan lain sebagainya. Bidang DAK memang digunakan untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP) namun hal itu masih belum cukup karena tidak dilanjutkan untuk mencapai kualifikasi tinggi yakni SMA/SMK sehingga masih belum mampu untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara langsung.

Permasalahan dalam pengalokasian dan penggunaan DAK turut menyebabkan proses pembangunan daerah tidak berjalan optimal sehingga tidak mampu memberikan pengaruh terhadap upaya pengentasan ketimpangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian SMERU (2008) menyatakan bahwa faktor nepotisme dan/atau kedekatan personal antara birokrat pemerintah dan pihak penerima proyek, seperti kepala sekolah atau kepala

puskesmas, ikut mewarnai penetapan proyek DAK. Sebagai contoh di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2006, ditemukan bahwa terdapat 5 SD yang mendapatkan DAK padahal kenyataannya 5 SD tersebut tidak layak mendapat DAK. Kemudian di tahun 2007, ditemukan lagi di Kabupaten Wonogiri bahwa rencana rehabilitasi gedung SD yang tidak tepat sasaran. Tercatat sebanyak 29 usulan dari 88 usulan rencana rehabilitasi SD dibatalkan karena dinilai tidak tepat sasaran. Penetapan proyek DAK yang tidak tepat sasaran seperti ini juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Hal ini membuat kualitas pendidikan tiap daerah berbeda yang menyebabkan kualitas SDM masyarakat menjadi timpang. Perbedaan kualitas SDM inilah yang kemudian dapat menciptakan kondisi ketimpangan pendapatan semakin tajam.

Persoalan petunjuk teknis dalam penggunaan DAK yang tidak sesuai dengan kondisi daerah juga turut menyebabkan DAK tidak dapat berkontribusi terhadap upaya pengurangan ketimpangan. Temuan yang dilakukan oleh lembaga penelitian SMERU menemukan bahwa Kabupaten Kupang lebih membutuhkan pembangunan jalan daripada pemeliharaan jalan. Namun dalam petunjuk teknis pengaturan DAK oleh pemerintah pusat menyatakan untuk pemeliharaan jalan dialokasikan sebanyak 70% DAK bidang infrastruktur jalan sedangkan untuk pembangunan jalan hanya 30% nya saja yang boleh digunakan.

Berdasarkan hasil estimasi Eviews diketahui bahwa nilai t-statistik untuk variabel BHP sebesar 0,7713 dan nilai prob sebesar  $0,4414 > \alpha = 0,05$  maka gagal menolak  $H_0$ . Artinya adalah variabel Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa bagi hasil pajak berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Namun penelitian dari Muhamad Sidik, Syurya Hidayat, dan Muhammad Ridwansyah yang dilakukan di Provinsi Jambi justru menemukan hal yang sama. Mereka menemukan bahwa DBH tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan daerah Jambi tahun 2010-2019 (Sidik, Hidayat, & Ridwansyah, 2020). Berdasarkan data pada tabel 4.1 diketahui bahwa provinsi penerima DBH pajak terbesar adalah provinsi DKI Jakarta disusul dengan provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Daerah yang infrastrukturnya sudah maju dan kemampuan ekonominya tinggi cenderung akan menerima porsi DBH Pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang masih terbelakang.

Dana bagi hasil pajak diperuntukkan untuk mengatasi kesenjangan vertikal antara pusat dan daerah serta kesenjangan horizontal. Besaran alokasi DBH Pajak didasarkan atas prinsip *by origin* maka daerah penghasil akan memperoleh dana bagi hasil pajak yang lebih besar dibandingkan daerah lain di dalam provinsi tersebut. Sedangkan besaran alokasi nya untuk DBH PBB adalah 10% untuk pemerintah yang kemudian dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota dan 90% untuk daerah yang bersangkutan. Kemudian untuk DBH PPh hanya 20% saja porsi yang dibagikan kepada daerah. Dari 20% tersebut dibagi menjadi 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 12% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan rincian 8,4% untuk kabupaten/kota yang terdaftar wajib pajak dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan porsi sama besar. Dari pembagian porsi di atas maka jatah yang diterima seluruh kabupaten/kota di luar daerah yang bersangkutan sangatlah kecil. Hal ini membuat daerah yang tertinggal akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya meskipun sudah menerima dana bagi hasil pajak. Perbedaan kondisi pada tiap daerah inilah yang menyebabkan kemampuan tiap daerah dalam melaksanakan pembangunan menjadi tidak sama sehingga pada akhirnya proses pembangunan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lambat.

Berdasarkan hasil estimasi Eviews diketahui bahwa nilai t-statistik untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 3,13 dan nilai prob sebesar  $0,002 < \alpha = 0,05$  maka menolak  $H_0$ . Artinya adalah variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien sebesar 0,000767 artinya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% maka ketimpangan pendapatan akan meningkat sebesar 0,000767. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Kuznets (1955) mengatakan bahwa dalam jangka pendek semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin lebar juga jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Sedangkan dalam jangka panjang peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diiringi dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Lundberg dan Squire, 2003) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan dibarengi dengan ketimpangan pendapatan yang meningkat pula (Lundberg & Squire, 2003).

Kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa transfer dana perimbangan memang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru menciptakan ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bukanlah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *trickle down effect*, di mana teori tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan ada bagian dari pertumbuhan ekonomi tersebut yang menetes ke bawah dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Menurut laporan Bank Dunia (2015) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya dinikmati oleh 20% masyarakat kelompok terkaya saja. Dari kondisi tersebut dapat dilihat telah terjadi *polarization effect*, di mana pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru semakin meningkatkan kesenjangan pendapatan masyarakat. *Polarization effect* menjelaskan tentang ketidakterkaitan antar sektor yang berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemajuan pada sektor padat modal (*capital intensive*) jauh lebih besar dibandingkan pada sektor padat karya (*labour intensive*) sehingga sektor padat modal mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan sektor padat karya. Hal ini berakibat bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya dinikmati oleh masyarakat kaya yang kegiatan ekonominya ditunjang oleh industri sedangkan mayoritas masyarakat masih berada pada kelompok menengah ke bawah yang kegiatan ekonominya masih ditunjang sektor pertanian. Kondisi seperti ini membuat jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah tinggi.

**Tabel 7.** *Cross-section Random Effects*

| No | Provinsi                 | Effect  | Perhitungan nilai intersep | Hasil intersep |
|----|--------------------------|---------|----------------------------|----------------|
| 1  | Nanggroe Aceh Darussalam | -0,0262 | 0,366 - 0,0262             | 0,3398         |
| 2  | Sumatera Utara           | -0,0283 | 0,366 - 0,0283             | 0,3377         |
| 3  | Sumatera Barat           | -0,0332 | 0,366 - 0,0332             | 0,3328         |
| 4  | Riau                     | -0,0205 | 0,366 - 0,0205             | 0,3455         |
| 5  | Jambi                    | -0,0222 | 0,366 - 0,0222             | 0,3438         |
| 6  | Sumatera Selatan         | -0,0087 | 0,366 - 0,0087             | 0,3573         |
| 7  | Bengkulu                 | -0,0069 | 0,366 - 0,0069             | 0,3591         |
| 8  | Lampung                  | -0,0099 | 0,366 - 0,0099             | 0,3561         |
| 9  | Bangka Belitung          | -0,0843 | 0,366 - 0,0843             | 0,2817         |
| 10 | Kepulauan Riau           | -0,0171 | 0,366 - 0,0171             | 0,3489         |
| 11 | Dki Jakarta              | 0,0218  | 0,366 + 0,0218             | 0,3878         |
| 12 | Jawa Barat               | 0,0628  | 0,366 + 0,0628             | 0,4288         |
| 13 | Jawa Tengah              | 0,0273  | 0,366 + 0,0273             | 0,3933         |
| 14 | Di Yogyakarta            | 0,0687  | 0,366 + 0,0687             | 0,4347         |
| 15 | Jawa Timur               | 0,0463  | 0,366 + 0,0463             | 0,4123         |
| 16 | Banten                   | 0,0214  | 0,366 + 0,0214             | 0,3874         |
| 17 | Bali                     | 0,0138  | 0,366 + 0,0138             | 0,3798         |
| 18 | Nusa Tenggara Barat      | 0,0123  | 0,366 + 0,0123             | 0,3783         |
| 19 | Nusa Tenggara Timur      | -0,0055 | 0,366 - 0,0055             | 0,3605         |
| 20 | Kalimantan Barat         | -0,0245 | 0,366 - 0,0245             | 0,3415         |
| 21 | Kalimantan Tengah        | -0,0237 | 0,366 - 0,0237             | 0,3423         |
| 22 | Kalimantan Selatan       | -0,0209 | 0,366 - 0,0209             | 0,3451         |
| 23 | Kalimantan Timur         | -0,0359 | 0,366 - 0,0359             | 0,3301         |
| 24 | Kalimantan Utara         | -0,0609 | 0,366 - 0,0609             | 0,3051         |
| 25 | Sulawesi Utara           | 0,0206  | 0,366 + 0,0206             | 0,3866         |
| 26 | Sulawesi Tengah          | -0,0122 | 0,366 - 0,0122             | 0,3538         |
| 27 | Sulawesi Selatan         | 0,0512  | 0,366 + 0,0512             | 0,4172         |
| 28 | Sulawesi Tenggara        | 0,0393  | 0,366 + 0,0393             | 0,4053         |
| 29 | Gorontalo                | 0,0509  | 0,366 + 0,0509             | 0,4169         |
| 30 | Sulawesi Barat           | 0,0017  | 0,366 + 0,0017             | 0,3677         |
| 31 | Maluku                   | -0,0224 | 0,366 - 0,0224             | 0,3436         |
| 32 | Maluku Utara             | -0,0558 | 0,366 - 0,0558             | 0,3102         |
| 33 | Papua Barat              | 0,0356  | 0,366 + 0,0356             | 0,4016         |
| 34 | Papua                    | 0,0454  | 0,366 + 0,0454             | 0,4114         |



Hasil output Eviews menunjukkan hasil *Cross-section Random Effects* pada setiap provinsi dalam Tabel 7. Dari hasil *Cross-section Random Effects* model pada Tabel 7 dapat diketahui Provinsi DIY memiliki nilai intersep ketimpangan pendapatan tertinggi sebesar 0,4347 disusul dengan provinsi Jawa Barat sebesar 0,4288 dan Sulawesi Selatan sebesar 0,4172. Sedangkan provinsi dengan nilai intersep terendah adalah provinsi Bangka Belitung sebesar 0,2817.

## Kesimpulan dan Implikasi

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah dana alokasi umum memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Ketika jumlah dana alokasi umum ditingkatkan maka ketimpangan pendapatan di Indonesia akan berkurang. Meski DAU berhasil berpengaruh negatif namun kontribusinya sangat kecil sehingga pemerintah pusat perlu untuk meningkatkan besaran DAU yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Selain itu besaran belanja pegawai oleh pemerintah daerah yang berasal dari DAU perlu untuk dikurangi dan digunakan lebih banyak untuk belanja modal supaya perekonomian daerah mampu tumbuh dan berkembang.

Jumlah dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya ketika jumlah dana alokasi khusus ditingkatkan oleh pemerintah maka masih belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Beberapa penyebabnya antara lain adalah arah kegiatan pada berbagai bidang yang dibiayai oleh DAK tidak mampu berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Bidang – bidang yang selama ini dibiayai oleh DAK hanyalah bidang – bidang dasar saja seperti bidang infrastruktur jalan, infrastruktur air minum, infrastruktur irigasi dan lain sebagainya. Selain itu, mis alokasi DAK dan ketidaksesuaian aturan porsi anggaran dengan kebutuhan di daerah juga turut menyebabkan DAK tidak mampu berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Pemerintah perlu untuk meningkatkan pengawasan realisasi belanja DAK supaya DAK yang diberikan pusat ke daerah mampu lebih tepat sasaran. Selain itu, pemerintah perlu untuk melakukan deregulasi terkait urusan teknis penentuan porsi arah kegiatan DAK yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan juga memberikan program alokasi DAK untuk dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Jumlah dana bagi hasil pajak tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti alokasi dana bagi hasil pajak yang diterima oleh pemerintah daerah juga tidak dapat memberikan dampak terhadap upaya pengurangan ketimpangan pendapatan. Beberapa penyebabnya antara lain adalah daerah yang infrastrukturnya sudah maju dan kemampuan ekonominya lebih tinggi cenderung akan menerima porsi DBH Pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang masih terbelakang. Selain itu, porsi DBH Pajak yang diterima oleh seluruh kabupaten/kota di luar daerah yang bersangkutan sangatlah kecil. Hal ini membuat daerah yang tertinggal akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya meskipun sudah menerima dana bagi hasil pajak. Porsi pembagian DBH Pajak yang selama ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang tidak bersangkutan perlu untuk lebih ditingkatkan supaya kemampuan keuangan antar daerah dalam memenuhi kebutuhan masing-masing daerah mampu lebih merata.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin timpang pula kondisi ketimpangan pendapatannya. Penyebab ketimpangan semakin lebar meskipun pertumbuhan ekonomi semakin meningkat karena telah terjadi polarization effect, di mana sektor padat modal mengalami kemajuan yang lebih tinggi dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan sektor padat karya. Sektor padat modal dikuasai oleh segelintir kelompok kaya sedangkan mayoritas besar masyarakat Indonesia masih berada pada sektor padat karya seperti sektor pertanian. Minimnya akses sebagian besar kelompok masyarakat Indonesia terhadap sektor padat modal menyebabkan semakin timpangnya kondisi ketimpangan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif perlu untuk lebih diperhatikan oleh pemerintah. Upaya redistribusi pendapatan melalui pajak perlu untuk terus ditingkatkan oleh pemerintah. Kegiatan migrasi penduduk ke daerah yang sudah maju juga perlu untuk diawasi. Penduduk yang

semakin terkonsentrasi di daerah maju menyebabkan upaya pembangunan antar daerah akan semakin tidak merata. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan stimulus kepada sektor padat karya yang telah mampu menyerap banyak tenaga kerja.

## Daftar Pustaka

- Akai, N., & Sakata, M. (2005). Fiscal Decentralization, Commitment and Regional Inequality: Evidence from State-level Cross-sectional Data for the United States. *CIRJE*.
- Ashfahany, A. E., Djuuna, R. F., & Rofiq, N. F. (2020). Does Fiscal Decentralization Increases Regional Income Inequality In Indonesia? *Jambura Equilibrium Journal*, 68-80.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2012-2015*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016-2019*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah*. Retrieved from [www.bps.go.id:https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab5](http://www.bps.go.id:https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab5)
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laju Pertumbuhan (Y on Y) PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (2010=100) (Persen)*. Retrieved from [www.bps.go.id:https://www.bps.go.id/subject/171/produk-domestik-regional-bruto--pengeluaran-.html#subjekViewTab5](http://www.bps.go.id:https://www.bps.go.id/subject/171/produk-domestik-regional-bruto--pengeluaran-.html#subjekViewTab5)
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2020*. Jakarta: BPS RI.
- Bank Dunia. (2015). *Indonesia's rising divide*. Jakarta: World Bank.
- Bouincha, Mohamed & Karim, Mohamed. (2018). Income Inequality and Economic Growth: An Analysis Using a Panel Data. *International Journal of Economics and Finance*. 10. 242. 10.5539/ijef.v10n5p242.
- Calderón, C., & Servén, L. (2004). *The Effects Of Infrastructure Development On Growth And Income Distribution*. Santiago de Chile: Central Bank of Chile.
- Fan, S., Zhang, L., & Zhang, X. (2002). *Growth, inequality, and poverty in rural China: the role of public investments*. Washington DC: International Food Policy Research Institute.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. New York: Douglas Reiner.
- Haryanto, J. T. (2015, Agustus 31). *Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*. Retrieved from [www.kemenkeu.go.id:https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya/](http://www.kemenkeu.go.id:https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya/)
- Herdiana, D. (2019). Hubungan Realisasi Transfer DAU dan DAK terhadap Kesenjangan Horizontal di Indonesia Study terhadap 33 Provinsi Periode Tahun 2009-2013. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 67-75.
- Kuznet, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 1-28.
- Lembaga Penelitian SMERU. (2008). *Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)*. Jakarta.
- Lundberg, M., & Squire, L. (2003). The simultaneous evolution of growth and inequality. *The Economic Journal*, 326-344.
- Myrdal, G. (1976). *Bangsa-Bangsa Kaya dan Miskin*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
- Rubin, A., & Segal, D. (2015). The effects of economic growth on income inequality in the US. *Journal of Macroeconomics*, 258-273.

- Schnellenbach, J., Baskaran, T., & Feld, L. P. (2014). Fiscal federalism, decentralization and economic growth: A meta-analysis. *Working Paper*.
- Sidik, M., Hidayat, S., & Ridwansyah, M. (2020). Dampak Alokasi Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) Terhadap Tingkat Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi Periode 2010-2019. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 229-238.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (Vol. Edisi 9). Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Wahiba, N. F., & Weriemmi, M. E. (2014). The Relationship Between Economic Growth and Income Inequality. *International Journal of Economics and Financial Issues* , 135-143.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widarjono, A. (2019). *Statistika Terapan Dengan Excel dan SPSS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yeeles, A. (2015). Intergovernmental Fiscal Transfers and Geographical Disparities in Local Government Income in the Philippines. *Journal of Southeast Asian Economies*, 32(3), 390–401. <http://www.jstor.org/stable/44132216>